



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.325, 2019

BPOM. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib memiliki sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satuan unit karena tercipta dari

kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan, kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.

3. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur mengenai:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis fasilitatif; dan
- b. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis substantif.

Pasal 3

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai panduan bagi pencipta dalam rangka penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis dan penyediaan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman.

Pasal 4

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan salah satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis pada setiap lembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 ayat (4) disebutkan “untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.”

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 31 yaitu: Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan: a. penciptaan arsip; b. penggunaan arsip; c. pemeliharaan arsip; dan d. penyusutan arsip.

Pada kenyataannya di lapangan, pengelolaan arsip dinamis belum dapat terlaksana secara efisien dan efektif sebagaimana yang diharapkan dan belum dapat dimanfaatkan dalam manajemen organisasi secara maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini telah mengubah paradigma bangsa Indonesia, bahwa semula informasi arsip dinamis prinsipnya tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Undang-

undang ini mewajibkan semua badan publik sebagai pencipta arsip menyediakan informasi yang dikuasainya kepada publik baik diminta maupun tidak diminta. Menurut Undang-Undang Nomor 43 dan Undang-Undang Nomor 14 tersebut apabila salah dalam memberikan informasi kepada publik akan merugikan berbagai pihak, baik bagi perorangan, masyarakat, organisasi termasuk pemerintah. Di sisi lain bagi pihak-pihak yang dengan sengaja ataupun tidak menyediakan informasi yang seharusnya dikecualikan, atau sebaliknya tidak menyediakan informasi yang seharusnya terbuka akan mendapatkan sanksi administrasi dan pidana.

Begitu pentingnya layanan informasi bagi publik dan dampaknya bagi kemaslahatan bersama, maka hal tersebut perlu diatur secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip dari aspek pengamanan dan kewenangan akses arsip. Oleh karena itu penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan POM perlu dilaksanakan dan dibakukan. Melalui Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan POM, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 542);
 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784).

C. Maksud dan Tujuan

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimaksudkan sebagai acuan/ petunjuk bagi dimaksudkan sebagai acuan/ petunjuk pelaksanaan bagi para pejabat struktural dan fungsional dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan penentuan akses arsip bagi publik serta perlindungan terhadap keamanan arsip.

Tujuan disusunnya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

1. mendorong unit-unit kerja untuk melakukan pemberkasan arsip dinamis di unit kerjanya secara tertib disertai dengan daftar arsip aktifnya.
2. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja untuk dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan.
3. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga.
4. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
5. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Satuan Kerja, Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

E. Pengertian umum

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satuan unit karena tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan, kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.

3. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerjasama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/SIM/TIK, pengawasan dan perlengkapan.
4. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi riset dan kajian, standardisasi, registrasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, penindakan, dan pengembangan pengujian.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
8. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
9. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
10. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

15. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun
16. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
18. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
19. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
20. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
22. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

F. PENGGOLONGAN AKSES ARSIP DINAMIS

1. Penggunaan Akses Arsip

Penggolongan pengguna yang berhak mengakses terhadap arsip dinamis, yaitu:

a. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi

- 1) Penentu Kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
 - (b) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
 - (c) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- 2) Pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - 3) Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi
- 1) Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
 - 2) Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

- 3) Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Pengguna yang berhak akses arsip dinamis

No	Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses	Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal/ Eksternal	Publik	Penegak Hukum
1.	Biasa / Terbuka	√	√	√	√	√
2.	Terbatas	√	-	√	-	√
3.	Rahasia	√	-	√	-	√
4.	Sangat Rahasia	√	-	√	-	√

2. Sifat Arsip

- a. Arsip dinamis BPOM terbagi menjadi tiga (3) kategori yang meliputi:
 - 1) biasa/umum/terbuka;
 - 2) terbatas; dan
 - 3) rahasia

Arsip dinamis di lingkungan BPOM yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja BPOM.

- b. Arsip dinamis di lingkungan BPOM yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan BPOM, yang meliputi :

- 1) arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, rekam medis pegawai;
 - 2) arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang BPOM;
 - 3) arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pemeriksaan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
 - 4) arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
 - 5) arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
- c. Arsip dinamis di lingkungan BPOM yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam kategori arsip rahasia, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja BPOM yang meliputi arsip dinamis seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain.
3. Pengamanan Arsip
- a. Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip. Pengamanan arsip kategori umum disimpan dalam rak arsip, arsip kategori terbatas di simpan pada *filling cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.
 - b. Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Bagian Arsip dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* BPOM. Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.
 - c. Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan BPOM meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia. Tujuan pengamanan merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	I KP KP.01	KEPEGAWAIAN					
		Bezzeting /Data Persediaan Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
2	KP.02 02.01	Formasi Pegawai					
		Usulan Permintaan Formasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	02.02	Persetujuan/Penetapan Formasi Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
		Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
3	KP.03 03.01	Pengadaan Pegawai					
		Penerimaan					Biro Umum dan SDM
		a. Lamaran Peserta yang Diterima	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Pengumuman Penerimaan					
		- Lamaran Peserta					
		- Panggilan Peserta Seleksi					
		- Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		b. Lamaran Peserta yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
	03.02	Pengangkatan CPNS dan PNS	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
		- Hasil Pemeriksaan Kesehatan					
		- SK Pengangkatan					
	03.03	Prajabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		Biro Umum dan SDM
	03.04	- Laporan Pelaksanaan Prajabatan Penempatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		Biro Umum dan SDM
4	KP.04	- SK Penempatan Pegawai Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan dan Uji Kompetensi					
	04.01	Ujian Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	04.02	Ujian Dinas	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	04.03	Uji Kompetensi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
5	KP.05	Mutasi Pegawai					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.01	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.02	Kenaikan Pangkat/ Golongan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.03	Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.04	Penyesuaian Masa Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.05	Mutasi Keluarga	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.06	Usul penetapan perubahan data dasar/ kedudukan hukum pegawai status/	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.07	Penyesuaian Turjangan Kinerja	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.08	Promosi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.09	Rotasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.10	Berkas Baperjakat	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.11	Seleksi Terbuka	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	05.12	Alih Tugas	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
6	6 KP.06	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai					
	06.01	Pengangkatan Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	06.02	Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
	06.03	Pemberhentian Pegawai tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu tugas dan fungsi organisasi BPOM	Biro Umum dan SDM
7	7 KP.07	Pendelegasian Wewenang					
	07.01	Pelaksana Tugas (Plt)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	07.02	Pelaksana Harian (Plh)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
8	KP.08	Administrasi Pegawai					
	08.01	Data/ Keterangan Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	08.02	Kartu Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
	08.03	Karis/Karsu	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
	08.04	Kartu Taspen	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
	08.05	Kartu Askes / BPJS/ Jamkesmas	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
9	KP.09	Pembinaan Karir Pegawai					
	09.01	Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pegak Hukum	Terkait dengan hasil penilaian	Biro Umum dan SDM
	09.02	Pembinaan Mental	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pegak Hukum	Terkait dengan data privasi pegawai	Biro Umum dan SDM
	09.03	Disiplin Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pegak Hukum	Terkait dengan data privasi pegawai	Biro Umum dan SDM
	09.04	Tanda Jasa/Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
10	KP.10	Pembinaan Jabatan Fungsional	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pegawas Internal	Pegawas Eksternal, Pegak Hukum	Terkait dengan hasil penilaian	Biro Umum dan SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Usulan pengangkatan - Penilaian dan penetapan angka kredit - SK Turjangan Jabatan					
11	KP.11	Kesejahteraan Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan data privasi pegawai	Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	11.01	Kesehatan					
		- Rekam Medik					
	11.02	Cuti	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	11.03	Rekreasi/ keagamaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	11.04	Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	11.05	Pinjaman Dana dan Perumahan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait informasi data pinjaman	Biro Umum dan SDM, Balai Besar/Balai, Loka
12	KP.12	Perselisihan/Sengketa/Keberatan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait data privasi pegawai	Biro Umum dan SDM
13	KP.13	Organisasi Non Kedinasan					
	13.01	KORPRI	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
	13.02	Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
	13.03	Perhimpunan Kepedulian Sosial Pegawai Badan POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	13.04	Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
	13.05	Lain-lain	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
14	KP.14	Berkas Perorangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan privasi perorangan	Biro Umum dan SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
II	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
	1	Kelembagaan/Organisasi					
	01.01	Analisis Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
		- Pembentukan Unit Kerja - Perubahan Unit Kerja - Pembubaran Unit Kerja					
	01.02	Evaluasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
2		- Perubahan Organisasi - Penyempurnaan organisasi.					
	01.03	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.02	Tata Laksana					
	02.01	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
	02.02	Monitoring dan Evaluasi SOP	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
III	HK	HUKUM					
	1	Program Legislasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2	HK.02	Produk Hukum Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
3	HK.03	Produk Hukum yang Bersifat Penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
4	HK.04	Dokumentasi Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
	04.01	Penanganan Perkara Litigasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
	04.02	Perkara Praperadilan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
	04.03	Perkara Pidana	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
	04.04	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)/	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
5	HK.05	Penanganan Perkara Non Litigasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
6	HK.06	Pertimbangan Hukum					
	06.01	Pertimbangan Hukum Permasalahan di Bidang Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
	06.02	Pertimbangan hukum Kepegawaian	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
7	HK.07	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hukum dan Organisasi
IV	PR	PERENCANAAN					
1	PR.01	Kebijakan dan Strategi Pembangunan					
	1.01	RPJP	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	01.02	RPJM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2	PR.02 02.01	Program Kerja Tahunan Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		
3	PR.03 03.01	Program Kerja Tahunan Instansi Perencanaan Anggaran RKA-KL/Pagu Indikatif/Sementara	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		
	03.02 03.03	Pagu Definitif DIPA	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		
	03.04 03.05	Target PNEP Ketentuan/Peraturan Anggaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
4	PR.04	Rencana Kinerja Tahunan					
	04.01	Rencana Kinerja Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	04.02	Rencana Kinerja Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
5	PR.05	Perjanjian Kinerja					
6	PR.06	Laporan					Biro Perencanaan dan Keuangan
	06.01	Laporan Bulanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
	06.02	Laporan Triwulan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	06.03	Laporan Semesteran	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	06.04	Laporan Tahunan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	06.05	Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	06.06	Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
7	PR.07	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	07.01	Laporan Akuntabilitas Unit kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pegawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
				Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
8	PR.08	Evaluasi Kinerja					
	08.01	Evaluasi Kinerja Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
	08.02	Evaluasi Kinerja Badan POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	08.03	Evaluasi Kinerja Badan POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
V	KU	KEUANGAN					
1	KU.01	Pelaksanaan Anggaran					
	01.12	Pengajuan UP/TUP	Tebatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	01.02	Pencairan Anggaran	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), - SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), - SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) - Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM) -Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), - Juklak/mekanisme pengelolaan APBN - Bahan Nota Keuangan..					
	01.03	Pengelolaan Belanja Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.04	Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	01.05	SKPP	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	01.06	Laporan Arus Kas	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Berita Acara Pemeriksaan - Kas/ register Penutupan Kas - Laporan realisasi anggaran (LRA) termasuk Arsip data computer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran(LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran					
	01.07	Data Rekening Bendahara	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
2	KU.02	Pengelolaan Perbendaharaan					Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.01	Perbendaharaan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.02	KP4 (Kartu Pengawas Pembayaran Penghasilan Pegawai)	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.03	Pajak	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.04	Penerimaan Non Pajak	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.05	Pengembalian Belanja	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.06	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.07	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	02.08	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
3	KU.03	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri					Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	03.01	Kesanggupan Negara Donor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	03.02	Nota Kesepahaman (MoU)	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	03.03	Loan Agreement PHLN KS	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Draft Agreement - Legal opinion - Korespondensi dengan lender					
	03.04	Alokasi dan Relokasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.05	Realisasi Pecairan Dana BLN	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- SP2D - SPM beserta lampiran antara lain SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.					
	03.06	Replenishment	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- No Objection Letter (NOL) - Project implementation - Notification of contract - Withdrawal authorization (W/A) - Statement of Expenditure (SE)					
	03.07	Staf Appraisal Report	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	03.08	Report/Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Progress report - Monthly Report - Quarterly report					
	03.09	Ketentuan/Peraturan Pinjam Luar Negeri (Pindah Bag. Hukum)	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
4	KU.04	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)					Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	04.01	Kebijakan SAI	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.02	Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	04.03	Daftar Transaksi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Daftar Transaksi (DT) - Pengeluaran (PK) - Perkiraan (PN) - Dokumen Sumber (DS) - Bukti Jurnal (BJ) - Surat Tanda Setor (STS) - Surat Setor Bukan Pajak (SSBP), - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - SPM - Daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)					
	04.04	Laporan Realisasi Bulanan SAI	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	04.05	Laporan Realisasi Triwulan SAI	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	04.06	Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Laporan Keuangan Bulanan - Laporan Keuangan Triwulan - Laporan Keuangan Semester - Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) - Laporan Keuangan Tahunan Audited					
VI	KS	KERJA SAMA					
1	KS.01	Kerja Sama Dalam Negeri					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.01	Antar Instansi Pemerintah	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan informasi kerja sama	Biro Kerja Sama
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Monitoring dan Evaluasi					
	01.02	Organisasi Non Pemerintah	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan informasi kerja sama	Biro Kerja Sama
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Monitoring dan Evaluasi					
2	KS.02	Kerja Sama Luar Negeri					
	02.01	Bilateral	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan informasi kerja sama	Biro Kerja Sama
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Monitoring dan Evaluasi					
	02.02	Multilateral	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan informasi kerja sama	Biro Kerja Sama
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Monitoring dan Evaluasi					
	02.03	Regional	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan informasi kerja sama	Biro Kerja Sama
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Monitoring dan Evaluasi					
	02.04	Organisasi Internasional	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan informasi kerja sama	Biro Kerja Sama
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Monitoring dan Evaluasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
VII	HM	KEHUMASAN					
	1	HM.01	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
2	HM.02	Dengar Pendapat/ Hearing DPR	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan kebijakan pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
3	HM.03	Hubungan Antar Lembaga Lembaga Negara	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
	03.01						
03.02		Pernyataan Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
03.03		Pernyataan Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
		- Release Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.04	Perguruan Tinggi/ Sekolah	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
	03.05	- Permohonan Narasumber Bakohumas	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
4	HM.04	- Surat Undangan Diseminasi Informasi Keprotokolan					
	04.01	Upacara/ Acara Kedinasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
	04.02	Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
	04.03	Agenda Pimpinan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan privasi pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
5	HM.05	Penyiapan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasiaan terkait kebijakan pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
		- Bahan Informasi (hasil telaahan, policy brief, rancangan eksekutif)					
		- naskah/pointer sambutan, materi presentasi, materi wawancara dengan media					
		- laporan hasil monitoring dan evaluasi program strategis					
6	HM.06	Dokumentasi dan Penerbitan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasiaan terkait kebijakan pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
7	HM.07	Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk, dan Iklan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
8	HM.08	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
9	HM.09	Pemberian Ucapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
10	HM.10	Pengelolaan Web Site	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
11	HM.11	Layanan Kehumasan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait kerahasiaan aduan yang ditangani dan privasi pihak yang mengajukan aduan	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, Balai Besar/Balai
	11.01	Layanan Pengaduan Masyarakat					
	11.02	- Resume pengaduan Layanan Komunikasi Informasi Edukasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, Balai Besar/Balai
		- Laporan KIE					
VIII	PL	PERLENGKAPAN					
1	PL.01	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
	01.01	Analisa Kebutuhan					
		-Daftar barang dan jasa yang sudah ada -Usulan barang dan jasa yang akan diadakan dari unit kerja					
		-Dokumen persetujuan pengadaan barang dan jasa (RKBMN)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.02	Daftar Penyedia Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
2	PL.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	02.01	Pengadaan Langsung	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK, - Spesifikasi Teknis, - Draf Kontrak), - HPS, - SPK, - BAST, - BA Pembayaran					
	02.02	Lelang Sederhana	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - Draf Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen Lelang					
	02.03	Lelang Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - Draf Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen Lelang					
	02.04	Lelang Cepat	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - Draf Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen Lelang					
	02.05	Penunjukan Langsung	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - Draf Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen Penunjukan Langsung					
	02.06	Swakelola	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- SK Tim Swakelola - SK Pengadalan Swakelola - SK Tim Pemeriksa Swakelola - Dokumen Swakelola					
	02.07	Sayembara	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- SK Tim Sayembara - SK Penetapan Sayembara - SK Penerima Hasil Sayembara - Dokumen Sayembara					
3	PL.03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)					
	03.01	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Laporan Penatausahaan BMN					
	03.02	Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Daftar inventarisasi BMN					
	03.03	Pendistribusian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- BAST					
	03.04	Penetapan Status penggunaan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
	03.05	Pemeliharaan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Usulan Pemeliharaan					
		- Laporan Pemeliharaan					
	03.06	Pemanfaatan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Usulan Pemanfaatan					
		- Laporan Pemanfaatan					
	03.07	Pemindahtanganan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Usulan Pemindahtanganan					
	03.08	Berita Acara Pemindahtanganan BMN Penyusutan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Daftar BMN yang akan disusutkan					
		- Laporan Penyusutan					
	03.09	Berita Acara Penyusutan BMN Penghapusan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Usulan daftar BMN yang akan dihapus					
		- Daftar BMN yang dinilai kembali					
		- SK Persetujuan penghapusan					
	03.10	Pelaporan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
	03.11	Pembinaan/Pengendalian/Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
IX	RT	KERUMAHTANGAAN					
1	RT.01	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Daftar PABX					
		- Bukti pembayaran					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2	RT.02	Perjalanan Dinas					
	02.01	Perjalanan dalam Negeri	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan privasi pimpinan	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
	02.02	Perjalanan Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan privasi pimpinan	Biro Umum dan SDM
3	RT.03	Penggunaan Fasilitas Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Form peminjaman fasilitas kantor - Permohonan peminjaman - Rekap penggunaan fasilitas kantor					
4	RT.04	Pengurusan Kendaraan Dinas	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Form peminjaman kendaraan - Permohonan peminjaman kendaraan - Pengelolaan BBM kendaraan dinas - Form pemeliharaan kendaraan dinas					
5	RT.05	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Bisa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Formulir permintaan perbaikan sarana dan prasarana					
		- Permohonan perbaikan sarana dan prasarana - Rekap tahunan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana					
6	RT.06	Renovasi Gedung dan Bangunan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses lelang yang belum selesai	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Gambar Teknis Bangunan - Form usulan renovasi gedung dan bangunan - Laporan hasil pekerjaan renovasi gedung dan bangunan					
7	RT.07	Pemeliharaan Fasilitas Kantor					Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	07.01	Jalan dan lingkungan Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Form usulan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor					
		- Laporan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor					
	07.02	Alat Elektronik dan Jaringan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Form usulan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor					
		- Laporan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor					
8	RT.08	Pengelolaan Limbah laboratorium	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan penyalahgunaan informasi	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
	08.01						
	08.02	Pengelolaan K3	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Permohonan					
		- Hasil analisis pemeriksaan					
		- Sertifikat hasil					
9	RT.09	Ketertiban dan Keamanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA
		- Jadwal penjagaan					
		- Laporan ketertiban dan keamanan					
X	KA	KEARSIPAN					
1	KA.01	Administrasi Persuratan					
	01.01	Pengurusan Surat Masuk	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/Besar, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Buku agenda - Formulir /catatan permintaan dan layanan penggandaan arsip					
	01.02	Pengurusan Surat Keluar	Biasa /Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/ Besar, LOKA
		- Buku Penomoran Surat - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi					
2	KA.02	Penyusunan Sistem	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	-	Biro Umum dan SDM
		- Pedoman/Juklak/Juknis Kearsipan..					
3	KA.03	Pembinaan Kearsipan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	-	Biro Umum dan SDM
		- Pedoman/Juklak/Juknis Kearsipan..					
4	KA.04	Pengelolaan Arsip Dinamis					
	04.01	Penataan Arsip	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Umum dan SDM, Balai/ Besar, LOKA
	04.02	Pemindahan Arsip	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Umum dan SDM, Balai/ Besar, LOKA
	04.03	Pemusnahan Arsip	Biasa /Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/ Besar, LOKA
	04.04	Penyerahan Arsip	Biasa /Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
5	KA.05	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Biasa /Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM
6	KA.06	Layanan Kearsipan	Biasa /Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Biro Umum dan SDM, Balai/ Besar, LOKA
XI	PS	PERPUSTAKAAN					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	PS.01	Pengadaan					
	01.01	Pengadaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Usulan bahan pustaka					
		- Daftar pengadaan bahan pustaka					
	01.02	Pengadaan Perunjang Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2	PS.02	Sosialisasi Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
3	PS.03	Pengurusan ISBN/ISSN	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
4	PS.04	Pengelolaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Surat Penerimaan buku dari Unit					
		- Surat Penyerahan buku atau majalah ke Unit					
		- Penyerahan Bukti Rekam Cetak Buku yang dihasilkan BPOM					
5	PS.05	Layanan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Form/buku peminjaman					
		- Form rujukan layanan pustaka					
XII	TI	TEKNOLOGI DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN					
1	TI.01	Perencanaan TIK					
	01.01	Master plan TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.02	Kebijakan TIK	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2	T1.02	Tata Kelola Data					Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- SK organisasi tata kelola data	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Kebijakan standar data	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Penyampaian hasil indeks kualitas data	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Kamus data	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	
		- Permintaan tampilan data pada dashboard	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
3	T1.03	Pengembangan TIK					Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Usulan Kebutuhan TIK	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Dokumen Pemetaan Aplikasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	
		- Dokumen Topologi Jaringan TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Dokumen Aset TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	
		- Dokumen Proses Bisnis Sistem Informasi	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Dokumen Hubungan Antar Database (ERD)	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	
		- Dokumen Uji Coba TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	
4	TI.04	Pemeliharaan TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Kerahasaan database aplikasi dan keamanan data	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
5	TI.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK					Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Dokumen survei layanan TIK	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Form survei	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Laporan hasil money	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait kerahasaan hasil monitoring	
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi kinerja per Triwulan	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
XIII	PB	PENGEMBANGAN PEGAWAI (PENDIDIKAN DAN LATIHAN)					
1	PB.01	Standarisasi dan Penilaian Kompetensi SDM					
	01.01	Penyusunan Standar Kompetensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	01.02	Penyusunan Kurikulum Diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
		- Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis JF-PFM (Draft) - Pedoman Penyusunan Kurikulum (Draft) - Kurikulum Modul Management Development Programme (MDP) - Kurikulum Modul Supervisor Development Programme (SDP) - Kurikulum Modul Eksekutif Development Programme (EDP) (Draft)					
	01.03	Penilaian Kompetensi Teknis	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	01.04	Penilaian Kompetensi Manajerial	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	01.05	Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2	PB.02	Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM					
	02.01	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	02.02	Evaluasi Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
XIV PI		PENGAWASAN INTERN					
1	PI.01	Rencana Program Pengawasan Intern					
	01.01	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	01.02	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	01.03	Rencana Induk Pengawasan (RIP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
2	PI.02	Audit					
	02.01	Audit Kinerja	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
	02.02	Audit terhadap aspek keuangan tertentu	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
	02.03	Audit denagn tujuan tertentu	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
3	02.04	Audit internal QMS ISO 9001:2015	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
	PI.03	Reviu					
	03.01	Reviu Laporan Keuangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
				Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
				Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
4	PI.04	Evaluasi AKIP	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
5	PI.05	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
6	PI.06	Pengawasan Lainnya					
	06.01	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	06.02	Gratifikasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
	06.03	Benturan Kepentingan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Inspektorat I dan II
	06.04	Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan privasi pemberi aduan	Inspektorat I dan II
	06.05	Whistleblowing System	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Pengak Hukum	Terkait dengan privasi pemberi aduan	Inspektorat I dan II
	06.06	Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	06.07	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Manajemen Risiko dan PM-EPITE)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	06.08	Kapabilitas APTP (Internal Audit Capability Model - IACM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.09	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	06.10	Konsultasi/Pendampingan Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II
	06.11	Bintek Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Inspektorat I dan II

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
I	RK.	RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN					
1	RK.01	Penyusunan Rencana Induk	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)		Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
		- Rencana induk				-	
		- Dokumen terkait rapat identifikasi kebutuhan				-	
		- Permintaan/proposal riset				-	
2	RK.02	Pelaksanaan Riset dan Kajian					Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
		- Instrumen Riset	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	
		- Surat Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Surat tugas dan surat izin	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Laporan uji coba	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Laporan hasil riset dan kajian	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	
3	RK.03	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
		- Formulir Hasil survei kepuasan pelanggan					
		- Formulir hasil money					
4	RK.04	Diseminasi					Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
		- Materi diseminasi internal	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	
		- Materi diseminasi eksternal	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
		- Laporan hasil diseminasi internal	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait kebijakan lembaga	
		- Laporan hasil diseminasi eksternal	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
II	SD	STANDARDISASI					
1	SD.01	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif					
	02.01	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.02	Penyusunan Rancangan Awal	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
	02.03	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat pembahasan dengan stakeholder					
		- Rancangan hasil pembahasan					
	02.04	Konsultasi Publik	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat konsultasi publik					
		- Masukkan dari <i>stakeholder</i>					
	02.05	Finalisasi Rancangan	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat finalisasi rancangan					
		- Rancangan final standar					
	02.06	Persetujuan Rancangan	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Form verbal					
		- Peraturan/ standar/ pedoman/ <i>code of practice</i>					
	02.07	Pengkajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholder</i>	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Hasil kajian/rekomendasi					
		- Dokumen rapat pembahasan hasil kajian					
	02.08	Harmonisasi Standar	Terbuka /Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen harmonisasi standar					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2	SD.02	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OTSK KOS)					
	02.01	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	02.02	Penyusunan Rancangan Awal	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Daftar hadir; - Notulen; - Undangan; - Draf hasil pembahasan awal.					
	02.03	Pembahasan dengan Stakeholder	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Dokumen rapat pembahasan dengan stakeholder					
		- Rancangan hasil pembahasan					
	02.04	Konsultasi Publik	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Dokumen rapat konsultasi publik					
		- Daftar hadir; - Notulen; - Undangan; - Draf hasil pembahasan awal; - Questionaire; - Masukan-masukan dari peserta/stakeholder. - Verbal dan draf final					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.05	Finalisasi Rancangan	Terbuka /Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Dokumen rapat finalisasi rancangan					
		- Rancangan final standar					
	02.06	Persetujuan Rancangan	Terbuka /Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Form verbal					
		- Peraturan/ standar /pedoman/ code of practice					
	02.07	Pengkajian Keamanan, Mutu dan Manfaat OTSK KOS	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Surat Permohonan Pengkajian; - Bahan kajian; - Daftar hadir, notulen, undangan, - Draf hasil pembahasan; - Laporan Kajian ke Pimpinan; - Surat Jawaban ke Pemohon - Hasil kajian/rekomendasi					
	02.08	Harmonisasi Standar	Terbuka /Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat pemberitahuan; - Surat balasan; - Surat tugas; - Jadwal; - Bahan presentasi; - Undangan; - Daftar hadir; - Notulensi; - Laporan					
	02.09	Monitoring/Evaluasi Implementasi/Regulatory Impact Assessment (RIA)	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
		- Surat Pemberitahuan - Surta Balasan setuju/Tidak - Surat Tugas - Form Monitoring/Evaluasi - Daftar Hadir - Notulensi - Hasil Pembahasan - Laporan					
3	SD.03	Standardisasi Pangan Olahan					
	03.01	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.02	Penyusunan Rancangan Awal	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.03	Pembahasan dengan Stakeholder	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat pembahasan dengan stakeholder					
		- Rancangan hasil pembahasan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.04	Konsultasi Publik	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.05	Finalisasi Rancangan	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.06	Persetujuan Rancangan	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.07	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Olahan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholder</i>	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.08	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Olahan Permintaan Pelaku Usaha	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholder</i>	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	03.09	Harmonisasi Standar	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat pemberitahuan; - Surat balasan; - Surat tugas; - Jadwal; - Bahan presentasi; - Undangan; - Daftar hadir; - Notulensi; - Laporan					
III	RG	REGISTRASI					
I	RG.01	Registrasi Obat					
	01.01	Pra Registrasi	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait. Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Registrasi Obat
		- SBP - Bukti Pengiriman registrasi - Dokumen yang disubmit - Lembar persetujuan Pra Registrasi					
	01.02	Proses Evaluasi	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait. Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Registrasi Obat
		a. Dokumen Evaluasi Registrasi Obat Baru					
		- Dokumen Administratif					
		- Kajian hasil evaluasi khasiat dan keamanan dan Hasil Keputusan Komnas					
		- Dokumen mutu dan penandaan					
		b. Dokumen Evaluasi Registrasi Obat Generik					
		- Dokumen Administratif					
		- Dokumen mutu dan penandaan					
		- Hasil penilaian in-situ					
		c. Dokumen Uji BE					
		- Protokol Uji BE - Laporan hasil pembahasan Uji BE - Nota Dinas Pengiriman Uji BE - Surat Rekomendasi - Laporan uji BE					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.03	Persetujuan Nomor Ijin Edar	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Registrasi Obat
		- Sertifikat ijin edar (NIE) - Surat Persetujuan Perubahan - Notifikasi					
	01.04	Pengembalian NIE	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Registrasi Obat
		- Dokumen pengembalian NIE					
		- Dokumen pencabutan/pembatalan NIE					
		- Dokumen pembekuan NIE					
	01.05	Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menghilangkan kepercayaan, merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Registrasi Obat
		- Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) Indonesia					
		- Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) negara lain					
	01.06	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik dan Obat Pengembangan Baru (OPB)	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Registrasi Obat
		- Protokol Uji Klinik - Hasil inspeksi Uji Klinik - Serious Adverse Event - Protokol Pengembangan Obat Baru - Dokumen Non Klinik - Dokumen Klinik - Persetujuan					
	01.07	Persetujuan Pemasukan Obat Jalur Khusus (Special Access Scheme)	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Registrasi Obat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Bukti Bayar - Surat Permohonan - Surat Persetujuan/Penolakan					
	01.08	Kajian khusus kasus Obat Tertentu	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Registrasi Obat
		- Permintaan Kajian - Data referensi terkait isu - Dokumen Pembahasan - Laporan - Hasil kajian					
2	RG.02	Registrasi OTSK KOS dan Uji Klinik					
	02.01	Registrasi OTSK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		a. Penolakan Registrasi - Arsip permohonan (data teknis dan data administrasi); - Surat penolakan/tambahan data;					
		b. Persetujuan Registrasi - Arsip permohonan (data teknis dan data administrasi); - Surat persetujuan registrasi/tambahan data. - Buku konsep nomor OTSK					
	02.02	Notifikasi Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Data administrasi (hardcopy); - Data teknis (dari sistem)					
	02.03	Pencabutan Nomor Ijin Edar OTSK dan Nomor Notifikasi KOS	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Data Teknis dan Administrasi; - Hasil Pengawasan; - Surat Pembatalan Izin Edar					
	02.04	Permohonan Protokol Uji Praktek/Uji Klinik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Registrasi OTSK KOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Administrasi Protokol Uji Praktikum/ Uji Klinik ; - Berkas inspeksi CUKB.					
	02.05	Penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Berita Acara Penilaian dan Hasil Penilaian DIP; - Surat Tindak lanjut Penilaian DIP; - Berkas CAPA DIP.					
	02.06	Pemohonan Rancangan Iklan OTSK	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Surat persetujuan - Surat penolakan					
3	RG.03	Registrasi Pangan Olahan					
	03.01	Pemohonan Registrasi Baru	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelanggan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	03.02	- Izin Edar Pangan Olahan Variasi Mayor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelanggan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Persetujuan Registrasi Variasi Mayor					
	03.03	Variasi Minor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelanggan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	03.04	- Persetujuan Registrasi Variasi Minor Registrasi Ulang	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelanggan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	03.05	Pendaftaran Iklan Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelanggan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	03.06	Registrasi Akun Perusahaan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelanggan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Izin Edar Pangan Olahan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.07	Pencabutan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan dokumen pelaaungan dan persaingan usaha	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
IV	PW	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN					
1	PW.01	Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif					
	01.01	Pelaksanaan Inspeksi Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Agenda Inspeksi (Aide Memoire, Surat Tugas)					
		-Laporan Hasil Inspeksi					
		-Surat Tindak Lanjut Hasil Inspeksi					
		-Laporan inspeksi sarana produksi dari BPOM					
		-Laporan dan surat hasil evaluasi CAPA hasil inspeksi					
	01.02	Asistensi Regulatori dan Supervisi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Agenda Inspeksi					
		-Berita Acara Pemeriksaan					
		-Lembar Hasil Inspeksi					
	01.03	Perizinan Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Izin Usaha Industri farmasi, Bahan Baku Obat, dan Sarana Khusus					
		-SK pencabutan Izin Industri Farmasi					
		-Dokumen yang brhubungan dengan Site Master Plan					
		-Data Sarana Produksi Bahan Baku Obat					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.04	Penilaian Pemenuhan CPOB terhadap Sarana Produksi Obat, NPP, Bahan Baku Obat, Sarana Khusus dan Fasilitas Obat Impor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Sertifikat CPOB/CPBBAOB yang diterbitkan					
		-Sertifikat CPOB/CPBBAOB yang dikembalikan					
		-Persetujuan penggunaan fasilitas bersama					
		-Surat keterangan GMP untuk ekspor					
		-Penilaian dokumen registrasi obat impor terkait pemenuhan CPOB					
	01.05	Pelaksanaan Kegiatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Laporan hasil sosialisasi					
		-Surat pengajuan IF					
		-Justifikasi IF beserta kajian					
		-Surat permohonan ke Kementerian Keuangan RI					
		-Surat pengajuan Rencana Impor Barang (RIB)					
		-Persetujuan pagu Keputusan Kemenkeu RI dan Penetapan pagu IF					
		-Dokumen pertanggungjawaban					
		-Monitoring Pengawasan pelaksanaan BMDTP					
	01.06	Verifikasi BMDTP ke Sarana	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Rencana verifikasi					
		-Agenda (aide memoire)					
		-Berita Acara					
		-Laporan Hasil Verifikasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.07	Pemeriksaan Balai	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
	01.08	Pemeriksaan Sarana Distribusi ONP dan BO oleh Pusat	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Laporan hasil pemeriksaan dari BB/BPOM					
	01.09	Pemeriksaan kasus	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
	01.10	-Laporan kasus dan Laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi oleh Pusat Tindak Lanjut Inspeksi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Laporan tindak lanjut					
	01.11	-Kajian atau telaah peredaran obat Penilaian/Sertifikasi CDOB	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Sertifikat CDOB yang diterbitkan					
		-Surat rekomendasi izin PBF dalam rangka pemenuhan CDOB					
		-Dokumen CAPA					
		-Berkas tembusan izin PBF Pusat dari Kementerian Kesehatan					
		-Berkas tembusan rekomendasi izin PBF cabang dari Balai Besar/Balai POM					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.12	Pengawasan Sarana Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait kerahasiaan hasil audit dan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BB/BPOM terkait sarana pelayanan dan kefarmasian					
		- Laporan hasil pengawasan penjualan online					
		- Laporan hasil evaluasi CAPA					
		- Laporan kajian sarana pelayanan dan kefarmasian					
		- Laporan Bimbingan Teknis CDOIB					
		- Dokumen terkait Pilot Project					
		- Dokumen terkait Barang bukti tindak pidana					
		- Laporan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor					
		- Surat pemberhentian sementara					
		- Surat pencabutan ijin edar					
		- Surat peringatan keras					
		- Laporan pembinaan PKM					
	01.13	Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Laporan Efek Samping Obat (ESO) dari tenaga kesehatan					
		-Laporan ESO dari pemegang izin edar dan <i>Periodic Safety Update Report (PSUR)</i>					
		-Kajian ESO					
		-Tindak lanjut ESO					
		-Monitoring Efek Samping Obat					
		-Laporan Surveillance					
	01.14	Pengawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		-Laporan bulanan hasil pengujian					
		-Laporan hasil pengujian obat TMS					
		-Laporan Monitoring TL TMS					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat tindak lanjut obat TMS					
		- Laporan hasil evaluasi dan penanganan obat TMS dari Industri Farmasi					
		- Petunjuk Prioritas Sampling					
		- Laporan Pengawasan Kasus					
	01.15	Pengawasan Promosi dan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Surat Respon ke BB/Balai POM					
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Iklan Obat kepada Industri					
		- Surat Tanggapan atas Respon Industri					
		- Surat Rekomendasi Penutupan Situs Internet kepada					
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Promosi / Iklan Obat pada Media Internet kepada Pemilik Situs					
		- Surat Tanggapan Pemilik Situs Internet					
		- Surat Permintaan Normalisasi Situs Internet kepada					
		- Dokumen Pengawasan promosi/iklan obat sebelum dipublikasikan					
		- Dokumen Pengawasan promosi/iklan obat setelah dipublikasikan					
		- Laporan pengaduan masyarakat terkait iklan obat					
		- Dokumen Pengawasan penandaan obat beredar (surat respon ke BB/Balai POM, Tindak Lanjut dan Tanggapan ke Industri farmasi)					
		- Laporan evaluasi kemasan siap edar					
		- Laporan pembinaan dalam rangka peningkatan kepatuhan penemuan iklan dan penandaan obat ke industri farmasi					
		- Dokumen rekomendasi penutupan situs internet dan permintaan normalisasi situs internet kepada Kemenkominfo					
		- Dokumen tindak lanjut pelanggaran dan tanggapan promosi iklan obat pada media internet kepada pemilik situs					
	01.16	Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Sertifikat Impor Obat (SKI)					
		- SKI <i>soft copy</i>					
		- Tembusan Surat SAS (Special Access Scheme) dari Direktorat Registrasi Obat					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Permohonan Web Reg/SKI Manual					
		- Rekomendasi Produsen Importir					
		- Berita Acara Sampling Vaksin					
		- Sertifikat Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika dan Prekursor					
	01.17	Pengawasan Produk Tembakau	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP Rokok)					
		-Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rokok					
		-Proceeding Hasil Pengawasan Rokok					
2	PW.02	Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan					
	02.01	Penilaian Sarana	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menyangkut kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Pengawasan OTSK, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Surat Permohonan; - Surat pernyataan; - Surat tugas; - Form Penilaian; - Aide memoar; Dokumen rapat Entry Meeting dan Close Meeting; - Berita Acara Hasil Penilaian; - Laporan hasil Penilaian; - Sertifikat CPOTB					
	02.02	Inspeksi Sarana	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi	Direktorat Pengawasan OTSK, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Bulanan hasil Inspeksi dari Balai					
		Tindak lanjut hasil inspeksi: - Surat tugas; - Form inspeksi; - Aide mentoar; - Dokumen rapat Entry Meeting dan Close Meeting; - Berita Acara Hasil inspeksi; - Tindak lanjut hasil inspeksi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.03	Pengawasan Informasi dan Promosi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Meryangkut kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Pengawasan OTSK, Balai Besar/Balai, LOKA
		a. Pengawasan Informasi Label/Kemasan: - Laporan Bulanan hasil pengawasan informasi dari balai yang diambil dari sistem maupun secara manual; - Rekapitulasi laporan bulanan pengawasan informasi dari balai; - Surat tindak lanjut hasil pengawasan informasi.					
		b. Pengawasan promosi: - Laporan Bulanan hasil pengawasan promosi dari balai yang diambil dari sistem maupun secara manual; - Rekapitulasi laporan bulanan pengawasan promosi dari balai; - Surat tindak lanjut hasil pengawasan promosi.					
	02.04	Pengawasan Keamanan dan Mutu	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi	Direktorat Pengawasan OTSK, Balai Besar/Balai, LOKA
		Pengawasan Keamanan: a. Tindak lanjut temuan OT (Tanpa Ijin Edar/Bahan Kimia Obat) dan SK (TIE/Bahan Berbahaya) b. Tindak lanjut temuan ULPK c. Surveillance dan analisis resiko - Laporan efek samping OTSK (ESOTSK) - Kajian ESOTSK - Tindak lanjut ESOTSK					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Pengawasan mutu : - Dokumen permohonan surat keterangan impor dan ekspor - Surat keterangan impor dan ekspor - Penantauan pelaksanaan dan evaluasi sampling dari BBPOM/BPOM - Laporan Bulanan Hasil Sampling - Tindak lanjut hasil sampling - Pedoman prioritas sampling - Evaluasi hasil pengujian OTSK BBPOM/BPOM - Evaluasi hasil pengujian OTSK P3OMN/BBPOM - Laporan pengujian OTSK - Laporan hasil verifikasi/uji absah/uji rujukan - Tindak lanjut dan tanggapan pengujian - Public warning - Laporan bulanan pengujian - Laporan OTSK - Tindak lanjut tanggapan dan pengujian					
3	PW.03	Pengawasan Kosmetik					
	03.01	Penilaian Sarana	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Menyangkut kerahasiaan dokumen perusahaan	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Sertifikat/surat penerapan CPKB - Surat evaluasi/persetujuan denah - Surat keterangan fasilitas bersama.					
	03.02	Inspeksi Sarana	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Bulanan hasil Inspeksi dari balai;					
		- Berita Acara Pemeriksaan Hasil inspeksi, tindak lanjut hasil inspeksi dan dokumen hasil evaluasi CAPA)					
		- Laporan Pengawasan Kasus					
	03.03	Target Pengawasan Informasi dan Promosi BB/BPOM	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		Surat edaran target pengawasan promosi/iklan kosmetik BB/BPOM					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.04	Target Pengawasan Informasi dan Promosi pada Sarana Produksi/distribusi Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Daftar target pemeriksaan promosi/ iklan dan informasi/ label kosmetik di sarana produksi/ distribusi kosmetik					
	03.05	Evaluasi Promosi/Iklan Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		Tabel rekapitulasi hasil evaluasi promosi/iklan kosmetik					
		- Tabel produk kosmetik berupa TMK/MK					
		- Evaluasi penandaan					
		- Tabel produk kosmetik berupa MS/TMS					
		- Laporan bulanan promosi atau iklan dan informasi atau label					
		- Surat feedback ke BB/BPOM seluruh Indonesia atau surat peringatan ke pemilik notifikasi atau Nota Rekomendasi tindak lanjut ke unit atau instansi terkait					
		- CAPA					
	03.06	Evaluasi Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Tabel rekapitulasi hasil evaluasi informasi/label kosmetik					
	03.07	Verifikasi Laporan Bulanan pengawasan promosi/iklan dan informasi/label kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan bulanan pengawasan iklan dan penandaan dari BB/BPOM di seluruh Indonesia					
		- Surat klarifikasi kepada BB/BPOM bila ada laporan bulanan yang tidak lengkap agar melengkapi laporan bulanan					
		- Hasil verifikasi terhadap temuan pelanggaran iklan kosmetik					
		- Hasil verifikasi terhadap kesimpulan hasil evaluasi iklan atau penandaan kosmetika					
		- Tabel produk promosi/iklan MK/TMK dan informasi/label kosmetik MS/TMS					
	03.08	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Promosi/Iklan dan Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	-	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Surat tindak lanjut dan/atau rekomendasi ke unit/instansi lain berupa: - Surat feedback ke BB/BPOM seluruh Indonesia - Surat peringatan ke pemilik notifikasi - Nota Rekomendasi tindak lanjut ke unit atau instansi terkait					
	03.09	Pemantauan dan Pendataan TLHP Promosi/Iklan dan Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
	03.10	Pengawasan Efek Samping dan Mutu Kandungan Produk	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Ceklis monitoring kosmetovigilans dari dalam dan luar negeri - Hasil evaluasi kelengkapan data laporan data efek samping - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut					
	03.11	Pengawasan Mutu Ekspor Impor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Permohonan izin SAS (Special Access Scheme) termasuk bukti bayarnya, rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2 - Hasil evaluasi permohonan izin SAS (Special Access Scheme), rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2 - Surat keterangan ekspor termasuk bukti bayarnya, izin SAS (Special Access Scheme), rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2 - Dokumen verifikasi teknis dalam rangka permohonan teknis - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Pengambilan Sampel - Tindak lanjut sampling - Hasil CoA - Laporan kegiatan layanan publik SKI/SKE					
	03.12	Sampling dan Pengujian Kosmetik	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Direktorat Pengawasan Kosmetik, Balai Besar/Balai, LOKA
		Berkas Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Sampling dari BBPOM/BPOM - Laporan Bulanan Hasil Sampling - Tindak lanjut hasil sampling - Pedoman prioritas sampling					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Berkas evaluasi hasil pengujian Kosmetik BPOM/BPOM - Laporan bulanan pengujian - Laporan Kosmetika TMS - Tindak Lanjut tanggapan dan pengujian					
		Berkas evaluasi hasil pengujian Kosmetik P3OMN/BBPOM - Laporan pengujian Kosmetik - Laporan hasil verifikasi/uji absah/uji rujukan - Public warning - Laporan bulanan pengujian - Laporan Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat - Tindak lanjut tanggapan dan pengujian					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
4	PW.04	Pengawasan Pangan Olahan					
	04.01	Pengawasan Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Surat Tugas					
		- Dokumen hasil pemeriksaan sarana produksi (Laporan,Berita acara pemeriksaan dan form pemeriksaan)					
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan					
	04.02	Pengawasan Sarana Distribusi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Surat Tugas					
		- Dokumen hasil pemeriksaan sarana distribusi (Laporan,Berita acara pemeriksaan dan form pemeriksaan)					
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan					
	04.03	Pengawasan Produk Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan pengujian pangan					
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengujian pangan					
	04.04	Pengawasan Label Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan pengawasan label pangan					
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan label pangan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.05	Pengawasan Iklan Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan pengawasan iklan pangan					
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan iklan pangan					
	04.06	Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Dokumen permohonan surat keterangan ekspor					
		- Dokumen permohonan surat keterangan impor					
		- Dokumen permohonan rekomendasi pemasukan pangan olahan asal hewan					
		- Surat keterangan ekspor					
		- Surat keterangan impor					
		- Surat rekomendasi pemasukan pangan olahan asal hewan					
	04.07	Pengawasan Kemasan Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan pengawasan kemasan pangan					
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan kemasan pangan					
	04.08	Penanganan Kasus Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Dokumen penanganan Kejadian Luar Biasa					
		- Dokumen INRASFF (Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed)					
		- Dokumen penanganan pengaduan konsumen					
		- Dokumen penanganan kasus lainnya					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.09	Sertifikasi Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Dokumen permohonan verifikasi program manajemen risiko					
		- Dokumen hasil verifikasi program manajemen risiko					
		- Dokumen sidang komisi program manajemen risiko					
		- Piagam program manajemen risiko					
		- Dokumen permohonan sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB)					
		- Dokumen hasil audit CPPOB					
		- Sertifikat CPPOB					
		- Dokumen permohonan dalam rangka labelisasi halal					
		- Dokumen hasil audit dalam rangka labelisasi halal					
		- Dokumen permohonan sertifikasi hygiene dan sanitasi (HS)					
		- Dokumen hasil audit hygiene dan sanitasi (HS)					
		- Sertifikat hygiene dan sanitasi (HS)					
		- Dokumen permohonan izin produsen bahan tambahan pangan(BTP)					
		- Dokumen hasil audit dalam rangka izin produsen bahan tambahan pangan(BTP)					
		- Surat persetujuan produsen bahan tambahan pangan (BTP)					
	04.10	Pengawasan Bahan Berbahaya	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan pengawasan bahan berbahaya					
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
V	PM	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA					
1	PM.01	Advokasi Pangan					
	01.01	Advokasi Pemerintah Daerah	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
	01.02	- Laporan Advokasi Pemerintah Daerah Advokasi Lintas Sektor	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
	01.03	- Laporan Advokasi Lintas Sektor Advokasi Komunitas Pendidikan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
	01.04	- Laporan Advokasi Komunitas Pendidikan Advokasi Ormas	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
	01.05	- Laporan Advokasi Ormas Advokasi Asosiasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
2	PM.02	- Laporan Advokasi Asosiasi Asistensi Regulasi	Terbatas	Pejabat Tinggi Pratama	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data asistensi regulasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Asistensi					
		- Laporan Hasil Kajian					
		- SPPIRT (sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
3	PM.03	Pendampingan Usaha	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data pendampingan Usaha	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
		03.01 Pendampingan UMKM					
		- Laporan Pendampingan					
		- Laporan Pelatihan TOT					
		- Database Fasilitator					
		- Hasil Uji Sampling					
4	PM.04	Pendampingan Usaha Ritel	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data pendampingan Usaha	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
		04.01 Bimtek dan Pelatihan					
		- Laporan Pendampingan					
		- Laporan Pelatihan TOT					
		- Database Fasilitator/Kader					
		- Hasil Uji Sampling					
		Peningkatan Kapasitas Pengetahuan, Sikap, Perilaku, dan Keterampilan Keamanan Pangan					
		04.01 Bimtek dan Pelatihan					
		- Bimtek dan Pelatihan					
		- Laporan Bimtek dan Pelatihan					
	04.02	Sosialisasi	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Database Materi Bimtek dan Pelatihan					
		- Database Peserta Bimtek dan Pelatihan					
		- Database Materi Bimtek dan Pelatihan					
		- Laporan Sosialisasi					
		- Database Peserta Sosialisasi					
		- Database Materi Sosialisasi					
		- Laporan Pameran					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.03	Produk Informasi Keamanan Pangan	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Database Produk					
		- Database Distribusi					
	04.04	Aplikasi Keamanan Pangan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Database Backup Aplikasi Keamanan Pangan					
VI	PD	PENINDAKAN					
1	PD.01	Pengamanan					
	01.01	Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan					Direktorat Pengamanan, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Dokumen Kajian trend/potensi Kejahatan Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil kajian	
		- Dokumen penggalangan pelaku usaha	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan hasil kajian	
		- Dokumen kegiatan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat	Terbuka/Biasa	Pejabat Eselon III Terkait yang diberikan izin, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, Penegak Hukum, Publik (Masyarakat Umum)	-	
	01.02	Penyusunan Peta Rawan Kasus					Direktorat Pengamanan, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Peta Rawan Kasus	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	
	01.03	Operasi Pengamanan					Direktorat Pengamanan, Balai Besar/Balai, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2	PD.02	Intelijen - Laporan Hasil Operasi Pengamanan	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	
				Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai, LOKA
				Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai, LOKA
3	PD.03	Penyidikan - Laporan Informasi	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai, LOKA
3	PD.03	Penyidikan - Laporan Pendalaman Informasi	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai, LOKA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.02	Operasi Penyidikan	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Operasi Penyidikan					
		- Laporan Kemajuan Penyidikan Pusat					
		- Laporan Kemajuan Penyidikan UPT BPOM					
		- Laporan penemuan barang bukti					
	03.03	Pembuatan Berkas Perkara	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Berkas Perkara					
		- Surat P 19					
		- Surat P 21					
		- Dokumen Penyerahan Barang Bukti dan Tersangka (Tahap II)					
		- Putusan Hakim					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
VII	PP	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL					
1	PP.01	Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan					
	01.01	Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai
		- Surat Permohonan Pengujian - Surat Perintah Bayar (SPB) - Lembar bukti pembayaran dari Bank - Lembar SIMPONI - CoA (Certificate of Analyst) - Formulir Penerimaan Sampel - Formulir Kaji Ulang Permintaan Pengujian - Formulir Kartu Kendali Sampel - Formulir Ketidaksuaian Sampel - Formulir Pengendalian Pekerjaan yang tidak sesuai - Lembar Disposisi - Formulir Pelayanan - Buku Besar Sampel (Soft/hard copy) - Buku Ekspedisi sampel - Buku Ekspedisi ka. P3OMN - Buku Ekspedisi Sertifikat/Laporan Pengujian - Buku Ekspedisi Internal R. Sampel - Buku Ekspedisi BB/BPOM - Buku Ekspedisi Internal BPOM - Buku Ekspedisi Arsip Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Perintah Kerja - Surat Perintah Uji - Surat Perintah Pengujian - Formulir Catatan Pengujian - Formulir Lampiran Catatan Pengujian - Formulir Laporan Hasil Uji - Formulir Konsep Sertifikat/Laporan Pengujian - Sertifikat/Laporan Pengujian - Suplemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Annandemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Pengantar Sertifikat/Laporan Pengujian - Tanggapan Hasil Pengujian BB/BPOM/Uji Absah					
	01.02		Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat Permohonan Uji Absah - CoA (Certificate of Analyst) - Formulir Penerimaan Sampel - Formulir Keji Ulang Permintaan Pengujian - Formulir Kartu Kendali Sampel - Formulir Ketidaksesuaian Sampel - Formulir Pengendalian Pekerjaan yang tidak sesuai - Lembar Disposisi - Formulir Pelayanan - Buku Besar Sampel (Soft/ hard copy) - Buku Ekspedisi sampel - Buku Ekspedisi Ka. P3OMN - Buku Ekspedisi Sertifikat/Laporan Pengujian - Buku Ekspedisi Internal R. Sampel - Buku Ekspedisi BB/BPOM - Buku Ekspedisi Internal BPOM - Buku Ekspedisi Arsip Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Perintah Kerja - Surat Perintah Uji - Surat Perintah Pengujian - Formulir Catatan Pengujian - Formulir Lampiran Catatan Pengujian - Formulir Laporan Hasil Uji - Formulir Konsep Sertifikat/Laporan Pengujian - Laporan Tanggapan Hasil Uji TMS BB/BPOM - Suplemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Amandemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Pengantar Sertifikat/Laporan Pengujian					
2	PP.02	Pengembangan Metode Analisis(Validasi/Verifikasi) dan Uji Kolaborasi	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat Permintaan usulan Judul Metode Analisis ke Bidang bidang - Surat Usulan permintaan /Judul MA ke DitWas Kedeputian - Dokumen perencanaan kegiatan pembuatan MA (POA) - Surat permintaan TIM Metode Analisa -SK Penetapan TIM Metode Analisa - Surat Permintaan usulan pengadaan reagen / media dan alat fungsional lainnya - Surat pemberitahuan uji kolaborasi ke UPT BPOM - Surat permintaan tim ahli MA - Undangan pembahasan MA - Daftar Hadir pembahasan MA - Notulensi pembahasan - Draf Naskah Validasi MA - Buku naskah validasi MA - Surat pengiriman buku MA ke UPT/ Unit BPOM - Surat undangan Sosialisai MA - Daftar Hadir - Notulensi sosialisasi - Metode Analisis					
3	PP.03	Pengembangan dan Distribusi Baku Pembanding					
	03.01	Pengembangan Baku Pembanding	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/ Balai

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAWANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat permintaan rencana sampling - Data rencana sampling - Daftar rencana permintaan Baku Pembanding - Surat undangan rapat koordinasi - Daftar hadir/ peserta - Notulensi - Daftar sampling - Data Baku Pembanding yang akan dikembangkan - Daftar rencana dan bahan untuk pengembangan BP kimia - Dokumen rencana pengembangan BP kimia - Formulir uji pendahuluan dalam rangka pengembangan BP kimia - SPK - SPP - CP/LCP - Surat pemberitahuan uji kolaborasi - Surat Undangan Uji kolaborasi - Daftar Hadir/ peserta - Formulir laporan hasil kolaborasi, (CP/LCP) - Sertifikat bahan baku pembanding					
	03.02	Pengelolaan dan Distribusi Baku Pembanding untuk Internal BPOM	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai
	03.03	Distribusi baku pembanding untuk eksternal	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	
		- Surat Permintaan Baku Pembanding dari Eksternal - Surat Perintah Bayar (SPB) - Lembar bukti bayar dari Bank - Lembar SIMPONI - Formulir Penyerahan Baku Pembanding Eksternal - Buku Ekspedisi					
4	PP.04	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian					
	04.01	Kegiatan kalibrasi di Internal BPOM	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat permintaan jadwal rencana kalibrasi periode tahunan - Surat konfirmasi persetujuan kalibrasi - Daftar alat yang akan dikalibrasi - Form persetujuan membawa alat kalibrator - Surat tugas - Formulir evaluasi pelaksanaan kalibrasi - Lembar hasil pengamatan - Lampiran hasil kalibrasi - Sertifikat kalibrasi - Formulir penerimaan hasil kalibrasi					
	04.02	Kegiatan kalibrasi di Eksternal BPOM	Terbatas	Pejabat Eselon II Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan informasi	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai
		- Surat Permohonan Kalibrasi - Surat Penawaran Harga Kalibrasi - Surat Perintah Bayar (SPB) - Lembar bukti pembayaran dari bank - Lembar SIMPONI - Surat Tugas - Formulir evaluasi pelaksanaan Kalibrasi - Lembar hasil pengamatan - Lampiran hasil Kalibrasi - Sertifikat Kalibrasi - Formulir penerimaan hasil Kalibrasi					
5	PP.05	Penyediaan Hewan Uji/Baku Mikrobi					
	05.01	Kegiatan Pengembanganbiakan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Hewan Uji Baku Mikrobi	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Dokumen rencana kegiatan pengadaan hewan uji dan baku mikroba - Surat permintaan pembelian / pengadaan hewan, pakan hewan, bedding, Obat hewan alat fungsional lainnya, dan perbaikan sarana prasarana, - Surat Pemberitahuan kegiatan lembur - Surat Perintah Kerja - Surat Perintah Pengerjaan - Dokumen/ Formulir - formulir yang berhubungan dengan pembiakan , pemeliharaan dan pengelolaan hewan uji - Dokumen pemeliharaan baku mikroba - Stock op name hewan uji (aplikasi/softcopy) - stock op name pakan hewan (aplikasi/softcopy)					
	05.02	Kegiatan Pengembanganbiakan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Hewan Uji Baku Mikroba	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai
		- Formulir permintaan dan penyerahan hewan percobaan - Formulir permintaan dan penyerahan pakan hewan - Surat permintaan pembelian hewan uji / baku mikroba - Surat Perintah Bayar (SPB) - Lembar bukti pembayaran dari bank - Lembar SIMPONI - Formulir penyerahan hewan percobaan kepada pelanggan eksternal - Surat keterangan sehat hewan uji - Sertifikat analisis baku mikroba - End user agreement					
6	PP.06	Uji Profisiensi/Uji Banding	Rahasia	Pejabat Eselon I Terkait, Pengawas Internal	Pengawas Eksternal, penegak Hukum	Penyalahgunaan Informasi/Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Besar/Balai

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat pemberitahuan pelaksanaan uji profesiensi/ uji banding - Formulir konfirmasi keikutsertaan uji profesiensi/ uji banding - Surat pemberitahuan pengiriman sampel uji profesiensi/ uji banding - Formulir penerimaan sampel uji profesiensi/ uji banding - Prosedur pelaksanaan uji profesiensi/ uji banding untuk peserta - Formulir hasil pengujian uji profesiensi/ uji banding untuk peserta - Laporan pelaksanaan uji profesiensi/ uji banding - Surat pemberitahuan pengiriman laporan hasil uji profesiensi/ uji banding ke peserta					

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO